

Kesiapsiagaan Sekolah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi : Pelajaran dari Banjir Bandang Aceh Tamiang 2025

Muhammad Jailani¹, Alfian Sani², Kemalawati³, Ismail⁴

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang ,Indonesia ,

² Institut Agama Islam Negeri Langsa , Indonesia

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang ,Indonesia,

⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang ,Indonesia

<https://aisyfathcenter.com/ajie>

Article History:

Received: 15 -10-2025

Revised: 25-11-2025

Accepted: 01-12-2025

Correspondence Email:

¹ muhammadjailani@staiat.ac.id ,

² alfiansani@iainlangsa.ac.id

³ kemalawati@staiat.ac.id ,

⁴ ismail@staiat.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana banjir bandang serta dampaknya terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian meliputi tiga kecamatan terdampak berat, yaitu Tamiang Hulu, Karang Baru, dan Manyak Payed. Informan penelitian berjumlah 37 orang yang terdiri atas kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan pejabat dinas pendidikan, yang dipilih secara purposif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan sekolah sebelum bencana berada pada kategori sangat rendah, ditandai dengan tidak adanya protokol evakuasi, sistem peringatan dini, maupun pelatihan simulasi bencana. Dampak banjir bandang terhadap pendidikan bersifat multidimensional, meliputi kerusakan infrastruktur sekolah, terhentinya proses pembelajaran, hilangnya dokumen pendidikan, serta munculnya trauma psikologis pada peserta didik. Respons darurat dan upaya pemulihan pembelajaran masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan koordinasi, fasilitas, dan akses terhadap peserta didik yang mengungsi.

Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kesiapsiagaan sekolah melalui integrasi Disaster Risk Reduction dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Rekomendasi utama meliputi

penyusunan rencana kesiapsiagaan sekolah, digitalisasi data pendidikan, integrasi pendidikan kebencanaan dalam kurikulum, serta pembangunan infrastruktur sekolah yang tangguh bencana. Dengan demikian, sistem pendidikan diharapkan menjadi lebih adaptif dan mampu menjamin keberlangsungan pembelajaran dalam situasi darurat.

Kata kunci: *Kesiapsiagaan Sekolah, Banjir Bandang, Pendidikan, Bencana, Aceh Tamiang*

PENDAHULUAN

Bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang menunjukkan tren peningkatan baik dari segi frekuensi maupun intensitas dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini tidak terlepas dari dampak perubahan iklim global yang memicu ketidakstabilan pola cuaca, peningkatan curah hujan ekstrem, serta perubahan siklus hidrologi. Dalam perspektif Ilmu Kebencanaan, kondisi tersebut menempatkan wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis tertentu pada tingkat risiko yang lebih tinggi. Indonesia sebagai negara kepulauan tropis dengan curah hujan tinggi, garis pantai yang panjang, serta banyaknya daerah aliran sungai, menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

Kabupaten Aceh Tamiang yang terletak di pesisir timur Provinsi Aceh merupakan contoh nyata wilayah dengan tingkat kerentanan tersebut. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh dataran rendah dengan jaringan sungai yang melintasi kawasan permukiman dan fasilitas publik, termasuk institusi pendidikan. Kondisi ini diperparah oleh faktor degradasi lingkungan, seperti berkurangnya kawasan resapan air dan alih fungsi lahan, yang menyebabkan daya tampung air menurun drastis. Dalam situasi curah hujan tinggi, sungai-sungai dengan mudah meluap dan memicu banjir bandang yang sulit diprediksi serta memiliki daya rusak yang besar.

Pada akhir tahun 2025, Aceh Tamiang mengalami salah satu bencana banjir bandang paling parah dalam sejarahnya. Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba pada malam hari, sehingga masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Air bah dengan arus yang kuat menghanyutkan rumah penduduk, merusak fasilitas umum, serta meluluhlantakkan berbagai sarana pendidikan. Hampir seluruh kecamatan terdampak, menyebabkan lumpuhnya aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan secara bersamaan. Dalam konteks pendidikan, situasi ini menciptakan kondisi darurat yang belum pernah diantisipasi sebelumnya.

Proses belajar mengajar terhenti secara total karena seluruh komponen pendidikan guru,

siswa, tenaga kependidikan, dan orang tua terfokus pada upaya penyelamatan diri dan keluarga. Ketiadaan koordinasi darurat dari pihak pemerintah daerah, khususnya dalam sektor pendidikan, semakin memperburuk kondisi. Tidak adanya sistem manajemen krisis pendidikan menunjukkan bahwa sektor ini belum menjadi prioritas dalam skema penanggulangan bencana daerah. Padahal, pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pembangunan manusia, bahkan dalam situasi krisis sekalipun.

Dampak yang ditimbulkan terhadap dunia pendidikan sangat signifikan dan bersifat multidimensional. Secara fisik, puluhan gedung sekolah mengalami kerusakan berat hingga hanyut terbawa arus. Dari sisi peserta didik, ribuan siswa kehilangan perlengkapan belajar, dokumen penting seperti ijazah dan rapor, serta akses terhadap pendidikan formal. Tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya terpaksa menghentikan pendidikan karena harus mengungsi atau membantu pemulihan ekonomi keluarga. Selain itu, aspek psikologis juga menjadi persoalan serius, di mana trauma akibat bencana berdampak pada menurunnya motivasi belajar dan kemampuan konsentrasi siswa.

Fenomena ini mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem pendidikan di daerah rawan bencana, khususnya dalam hal kesiapsiagaan dan mitigasi. Sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan, sistem peringatan dini, maupun mekanisme pembelajaran alternatif seperti pembelajaran darurat atau berbasis komunitas. Bahkan, pengelolaan dokumen penting masih dilakukan secara konvensional tanpa sistem cadangan digital yang aman. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara sektor pendidikan dan manajemen risiko bencana masih sangat minim.

Dalam kerangka Manajemen Risiko Bencana, kesiapsiagaan merupakan salah satu komponen penting yang menentukan tingkat dampak suatu bencana. Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang aman (*safe school*) yang mampu melindungi seluruh warganya dari risiko bencana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sekolah dalam menghadapi bencana menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Aceh Tamiang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tingkat kesiapsiagaan sekolah sebelum terjadinya bencana, mengidentifikasi dampak banjir bandang terhadap keberlangsungan pendidikan, serta merumuskan strategi mitigasi dan adaptasi yang relevan. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi

rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik risiko serupa. Dengan demikian, upaya penguatan pendidikan kebencanaan, pembangunan sistem sekolah tangguh bencana, serta integrasi kebijakan lintas sektor dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Pada akhirnya, pendidikan tidak hanya menjadi sektor yang terdampak bencana, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membangun masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap berbagai risiko di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana, khususnya dalam konteks pasca banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2025. Dalam perspektif Penelitian Kualitatif, studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang terjadi secara kontekstual dalam setting nyata dengan batasan ruang dan waktu yang jelas.

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposif pada tiga kecamatan yang mengalami dampak paling signifikan akibat banjir bandang, yaitu Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Karang Baru, dan Kecamatan Rantau. Ketiga wilayah ini dipilih berdasarkan indikator tingkat kerusakan infrastruktur pendidikan, jumlah sekolah terdampak, serta besarnya populasi peserta didik yang mengalami gangguan proses pembelajaran. Pemilihan lokasi secara purposif ini bertujuan untuk memperoleh data yang kaya (rich data) dan relevan dengan fokus penelitian.

Subjek penelitian terdiri atas berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam dunia pendidikan yang terdampak langsung oleh bencana. Informan penelitian meliputi kepala sekolah sebanyak 5 orang, guru mata pelajaran sebanyak 10 orang, peserta didik sebanyak 15 orang, orang tua siswa sebanyak 5 orang, serta pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 2 orang. Dengan demikian, total informan dalam penelitian ini berjumlah 37 orang. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) mengalami secara langsung dampak banjir bandang, (2) terlibat dalam proses pemulihan pendidikan pasca bencana, dan (3) memiliki pengetahuan atau informasi yang mendalam terkait kesiapsiagaan sekolah sebelum bencana terjadi.

Fokus penelitian diarahkan pada beberapa aspek utama, yaitu: (1) tingkat kesiapsiagaan sekolah sebelum terjadinya banjir bandang, (2) dampak bencana terhadap proses pembelajaran dan administrasi pendidikan, (3) respons darurat yang dilakukan oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan, (4) strategi pemulihan pembelajaran pasca bencana, serta (5) identifikasi pelajaran (*lesson learned*) yang dapat dijadikan dasar dalam penguatan sistem pendidikan di daerah rawan bencana. Fokus ini dirumuskan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai siklus manajemen bencana dalam sektor pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode untuk memastikan kedalaman dan keabsahan data. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel, sehingga memungkinkan eksplorasi informasi secara lebih luas sesuai dengan pengalaman informan. Kedua, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi fisik sekolah, lingkungan sekitar, serta aktivitas pemulihan pendidikan yang sedang berlangsung. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa foto, video, laporan kerusakan sekolah, arsip dinas pendidikan, serta pemberitaan media massa yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Model ini meliputi tiga tahapan utama yang berlangsung secara siklus, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, dan bagan untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus dengan proses verifikasi agar temuan yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Keabsahan data (*trustworthiness*) dalam penelitian ini dijamin melalui beberapa teknik. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan pihak dinas pendidikan. Kedua, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga, member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian antara interpretasi peneliti dan realitas di lapangan. Selain itu, peneliti juga melakukan *peer debriefing* dengan rekan sejawat yang memiliki kompetensi dalam bidang Manajemen Bencana Pendidikan guna memperoleh masukan kritis terhadap hasil analisis.

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap

pertama adalah persiapan, yang meliputi studi literatur, penyusunan instrumen penelitian, serta pengurusan perizinan penelitian. Tahap kedua adalah pengumpulan data yang mencakup survei awal, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan pengumpulan dokumentasi. Tahap ketiga adalah analisis data yang dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian yang meliputi penulisan hasil, pembahasan, serta penarikan kesimpulan dan rekomendasi.

Seluruh rangkaian penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2026, yaitu sekitar tiga bulan setelah terjadinya bencana. Rentang waktu ini dipilih dengan pertimbangan bahwa fase tersebut merupakan periode awal pemulihan (*early recovery*), sehingga data yang diperoleh masih mencerminkan kondisi aktual dampak bencana serta respons yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam sektor pendidikan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang autentik dan mendalam mengenai kesiapsiagaan serta ketahanan sistem pendidikan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Bencana Banjir Bandang Aceh Tamiang 2025

Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada pertengahan November 2025 merupakan salah satu bencana hidrometeorologi paling destruktif dalam beberapa tahun terakhir di wilayah tersebut. Peristiwa ini dipicu oleh curah hujan ekstrem yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut, yang menyebabkan meluapnya Sungai Tamiang beserta anak-anak sungainya. Dalam perspektif Perubahan Iklim, intensitas hujan ekstrem seperti ini semakin sering terjadi sebagai dampak anomali iklim global (IPCC, 2021).

Air bah datang secara tiba-tiba pada dini hari dengan ketinggian mencapai 3–4 meter di beberapa titik, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi. Seluruh 12 kecamatan terdampak, dengan 8 kecamatan mengalami kerusakan berat. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa 147 unit sekolah terdampak, terdiri atas 53 sekolah rusak berat/hanyut, 67 rusak sedang, dan 27 rusak ringan. Lebih dari 12.000 siswa kehilangan perlengkapan belajar, sementara sekitar 3.500 siswa terpaksa mengungsi dan belum dapat kembali bersekolah hingga tiga bulan pascabencana.

Temuan ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga mengganggu sistem sosial, termasuk sektor pendidikan secara sistemik.



Gambar : Peta Kabupaten Aceh Tamiang

2. Kesiapsiagaan Sekolah Sebelum Bencana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan sekolah di Aceh Tamiang sebelum bencana berada pada kategori sangat rendah. Hampir seluruh sekolah tidak memiliki dokumen rencana kesiapsiagaan bencana (disaster preparedness plan), tidak tersedia jalur evakuasi yang jelas, serta tidak adanya sistem peringatan dini di lingkungan sekolah. Selain itu, tidak ditemukan adanya pelatihan simulasi bencana secara rutin baik bagi guru maupun peserta didik.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya implementasi konsep Disaster Risk Reduction di sektor pendidikan. Padahal, menurut UNDRR (2015), kesiapsiagaan merupakan salah satu komponen utama dalam mengurangi dampak bencana. Pernyataan kepala sekolah yang diwawancarai mengindikasikan bahwa pengalaman bencana sebelumnya yang relatif kecil telah menciptakan persepsi risiko yang rendah (risk perception bias), sehingga tidak mendorong tindakan mitigasi yang memadai.



Gambar : Disaster Risk Reduction

Lebih jauh, tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk mitigasi bencana di sekolah serta minimnya koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga penanggulangan bencana menunjukkan bahwa kesiapsiagaan belum menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan daerah. Hal ini sejalan dengan temuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2011) yang menyatakan bahwa sebagian besar sekolah di Indonesia belum memiliki kapasitas kesiapsiagaan bencana yang memadai.

3. Dampak Banjir terhadap Pendidikan

Dampak banjir bandang terhadap sektor pendidikan di Aceh Tamiang bersifat multidimensional, meliputi aspek fisik, administratif, sosial, dan psikologis.

Pertama, terhentinya proses pembelajaran secara total selama lebih dari tiga bulan menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum memiliki mekanisme pembelajaran darurat (*education in emergencies*). Menurut UNICEF (2017), keberlangsungan pendidikan dalam situasi darurat sangat penting untuk menjaga stabilitas psikologis dan sosial anak.

Kedua, hilangnya dokumen pendidikan seperti rapor, ijazah, dan arsip sekolah mengindikasikan lemahnya sistem manajemen data pendidikan. Ketergantungan pada dokumen fisik tanpa sistem cadangan digital menyebabkan kerugian administratif yang signifikan. Hal ini memperkuat pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pendidikan.

Ketiga, munculnya trauma psikologis pada peserta didik menjadi salah satu dampak yang paling serius. Banyak siswa mengalami gejala *Post-Traumatic Stress Disorder*, seperti kecemasan, ketakutan berlebihan, dan kesulitan berkonsentrasi. Menurut penelitian Norris et al. (2002), anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami dampak psikologis jangka panjang akibat bencana.

Keempat, kerusakan sarana dan prasarana pendidikan memperlambat proses pemulihan. Fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang rusak menyebabkan keterbatasan akses terhadap pembelajaran yang layak.

4. Respons Darurat dan Pemulihan Pembelajaran

Respons darurat di sektor pendidikan menunjukkan adanya keterlambatan yang signifikan, terutama pada fase awal pascabencana. Hal ini disebabkan oleh lumpuhnya sistem pemerintahan daerah serta tidak adanya rencana kontinjensi khusus sektor pendidikan.

Pemulihan pembelajaran dilakukan secara bertahap melalui pendekatan darurat, seperti penggunaan tenda pengungsian sebagai ruang belajar dan keterlibatan relawan pendidikan. Pendekatan ini sesuai dengan konsep *temporary learning spaces* dalam kerangka pendidikan

darurat (INEE, 2010). Namun, efektivitasnya masih terbatas karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya.

Tantangan terbesar adalah menjangkau siswa yang mengungsi ke luar daerah, seperti ke Aceh Timur, Langsa, dan Medan. Ketidaktersediaan listrik dan akses internet menyebabkan pembelajaran jarak jauh tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih menjadi masalah utama di daerah terdampak bencana.

Selain itu, para pendidik dan relawan juga berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran darurat di tenda-tenda pengungsian yang tersebar di wilayah Aceh Tamiang. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan psikososial bagi anak-anak yang terdampak bencana. Melalui aktivitas belajar yang bersifat fleksibel, interaktif, dan menyenangkan, anak-anak secara perlahan dapat mengurangi rasa trauma, kecemasan, dan ketakutan pascabencana.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *psychosocial support in education in emergencies*, di mana pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang aman (*safe space*) untuk memulihkan kondisi emosional peserta didik. Interaksi dengan guru dan teman sebaya di lingkungan belajar sementara membantu anak-anak membangun kembali rasa aman dan rutinitas harian yang sempat hilang akibat bencana. Dengan demikian, pembelajaran di tenda pengungsian memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam mendukung pemulihan mental dan sosial

5. Pelajaran untuk Kesiapsiagaan Sekolah ke Depan

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa pelajaran strategis yang dapat diambil untuk memperkuat kesiapsiagaan sekolah di masa depan.

Pertama, setiap satuan pendidikan di daerah rawan bencana harus memiliki protokol kesiapsiagaan yang terintegrasi dalam perencanaan sekolah. Protokol ini mencakup sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul, serta pelaksanaan simulasi bencana secara berkala.

Kedua, digitalisasi dokumen pendidikan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko kehilangan data. Sistem penyimpanan berbasis cloud dapat menjadi solusi efektif dalam menjaga keamanan data pendidikan.

Ketiga, integrasi pendidikan kebencanaan dalam kurikulum formal perlu diperkuat. Hal ini sejalan dengan konsep *Education for Disaster Risk Reduction* yang menekankan pentingnya membangun kesadaran dan kapasitas peserta didik sejak dini.



Gambar : Education for Disaster Risk Reduction

Keempat, pembangunan infrastruktur sekolah harus mengacu pada prinsip ketahanan bencana (*disaster-resilient infrastructure*). Hal ini meliputi pemilihan lokasi yang aman, desain bangunan tahan bencana, serta penyediaan fasilitas darurat.

Kelima, pembentukan tim siaga bencana di tingkat sekolah menjadi langkah penting dalam meningkatkan respons cepat terhadap bencana. Tim ini harus dilatih secara berkala oleh lembaga terkait seperti BPBD.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa tingkat kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana di Indonesia masih relatif rendah (LIPI, 2011; UNDRR, 2015). Padahal, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah telah menegaskan pentingnya peran sektor pendidikan dalam penanggulangan bencana.

Kasus Aceh Tamiang menunjukkan bahwa ketidaksiapan sekolah tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga mengancam pemenuhan hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip Safe Schools Declaration (2015) yang menekankan perlindungan pendidikan dari dampak bencana dan konflik.

Kelemahan utama terletak pada absennya perencanaan kesiapsiagaan yang spesifik untuk sektor pendidikan. Selama ini, pendekatan penanggulangan bencana masih bersifat umum dan belum menyentuh kebutuhan spesifik sekolah sebagai ruang publik yang menampung kelompok rentan, khususnya anak-anak.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan kerangka Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector (2017) melalui konsep *Comprehensive School Safety Framework* yang mencakup tiga pilar utama: fasilitas belajar yang aman,

manajemen bencana di sekolah, dan pendidikan pengurangan risiko bencana. Ketiga pilar ini belum diimplementasikan secara optimal di Aceh Tamiang.

Selain itu, kendala dalam implementasi pascabencana menunjukkan adanya keterbatasan regulasi teknis dan anggaran di sektor pendidikan. Fokus yang lebih besar pada rehabilitasi dibandingkan mitigasi menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat reaktif.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menjadi proaktif dalam pengelolaan bencana di sektor pendidikan. Pemerintah perlu menetapkan standar nasional kesiapsiagaan sekolah serta menjadikannya sebagai indikator dalam sistem akreditasi pendidikan. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi institusi yang tangguh terhadap bencana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapsiagaan satuan pendidikan sebelum terjadinya bencana berada pada kategori sangat rendah. Sebagian besar sekolah tidak memiliki rencana kesiapsiagaan, tidak tersedia sistem peringatan dini, serta tidak pernah dilakukan pelatihan simulasi bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *Disaster Risk Reduction* belum terintegrasi secara efektif dalam sistem pendidikan di daerah tersebut.

Dampak banjir bandang tahun 2025 terhadap sektor pendidikan bersifat luas dan multidimensional. Tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur sekolah, tetapi juga mengakibatkan terhentinya proses pembelajaran dalam waktu yang cukup lama, hilangnya dokumen pendidikan penting, serta munculnya trauma psikologis pada peserta didik. Situasi ini memperlihatkan bahwa ketidaksiapan sekolah memperbesar risiko terganggunya hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan, terutama dalam kondisi darurat.

Respons darurat dan upaya pemulihan pembelajaran yang dilakukan pascabencana masih menghadapi berbagai kendala, seperti lambatnya koordinasi, keterbatasan fasilitas, serta kesulitan menjangkau peserta didik yang mengungsi. Meskipun terdapat inisiatif pembelajaran darurat di tenda pengungsian dan pembangunan sekolah sementara, efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan belum adanya sistem pendidikan darurat yang terstruktur.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan bencana di sektor pendidikan, dari pendekatan reaktif menjadi proaktif. Sekolah perlu diposisikan sebagai bagian integral dalam sistem penanggulangan bencana, bukan sekadar objek terdampak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki rencana kesiapsiagaan, digitalisasi data pendidikan, integrasi pendidikan kebencanaan dalam kurikulum, serta pembangunan infrastruktur sekolah yang tangguh terhadap bencana.

Dengan demikian, penguatan kesiapsiagaan sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan, tetapi juga memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, dan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih tangguh, adaptif, dan mampu menjamin keberlangsungan pembelajaran dalam situasi bencana di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2017). *Buku pedoman latihan kesiapsiagaan bencana*. BNPB.
- Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector. (2017). *Comprehensive school safety framework*. GADRRRES.
- Hanifah, Dian Dwiana Maydinar, Marlin Sutrisna. (2024). Pengaruh Make A Match Method Terhadap Pengetahuan Kesiapsiagaan Banjir Pada Siswa SDN 89
<https://doi.org/10.31004/jkt.v5i1.19232>
- Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE). (2010). *Minimum standards for education: Preparedness, response, recovery*. INEE.
- Inter-Agency Standing Committee. (2007). *Guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings*. IASC.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). *Climate change 2021: The physical science basis*. Cambridge University Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Panduan satuan pendidikan aman bencana*. Kemendikbud.
- Masten, A. S. (2014). *Ordinary magic: Resilience in development*. Guilford Press.
- Mudhofar, M. N., Mu'awanah, M., Purnomo, H., & Normawati, A. T. (2022). Intervensi kesiapsiagaan bencana dalam peningkatan pengetahuan siswa. *Jurnal Keperawatan*, 14(2).

- Norris, F. H., Friedman, M. J., Watson, P. J., Byrne, C. M., Diaz, E., & Kaniasty, K. (2002). 60,000 disaster victims speak: Part I. *Psychiatry*, 65(3), 207–239.
- Nurfadilah, N., & Darsono, D. R. (2021). Pendidikan kebencanaan pada lembaga PAUD rawan banjir di Jakarta Pusat. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1). <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.637>
- Nurmansyah, M., & Buanasasi, A. (2019). Pengaruh pendidikan kebencanaan banjir bandang terhadap kesiapsiagaan mahasiswa. *Jurnal Keperawatan*, 7(1). <https://doi.org/10.35790/jkp.v7i1.25205>
- Palupi, H. S., Masution, M. W., Rida, P. A., & Meliyani, M. (2019). Analisis tingkat kesiapan guru dalam menerapkan materi kebencanaan. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 3(2). <https://doi.org/10.29408/geodika.v3i2.1751>
- Purwani, A., & Nurfadilah, N. (2018). Kesiapsiagaan lembaga pendidikan anak usia dini dalam menghadapi bencana banjir. *Jurnal AUDHI*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Reza, M., Humaira, N., Anida, A., Fitri, M. S., & Faulinda, S. (2024). Sekolah tangguh bencana: Pendampingan literasi kebencanaan bagi siswa dan guru. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.63822/yjqqxj64>
- Sari, R. V., Ketaren, O., Tarigan, F., Nababan, D., & Sitorus, M. E. (2020). Tingkat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir pada sekolah dasar. *Jurnal Semesta Sehat*, 1(2). <https://doi.org/10.58185/j-mestahat.v1i2.81>
- Trifianingsih, D., Sitompul, D. R., & Rahman, A. (2025). Edukasi kebencanaan dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana banjir pada siswa sekolah dasar. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(9), 2050–2057. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i9.9428>
- UNICEF. (2017). *Education in emergencies*. UNICEF.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). *Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030*. UNDRR.
- Wijayaningsih, K. S., & Tawil, S. (2023). Upaya peningkatan tanggap bencana melalui simulasi kebencanaan. *Jurnal Abmas Negeri*, 5(2). <https://doi.org/10.36590/jagri.v5i2.1314>
- World Health Organization. (2013). *Building back better: Sustainable mental health care after emergencies*. WHO Press.

